

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PROSES PENYIDIKAN DILEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris mengkehendaki agar notaris dalam menjalankan tugas menjadi pejabat umum, selain harus tunduk jabatan notaris harus tunduk pada kode profesi serta harus bertanggungjawab pada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara. Notaris yang mengabaikan seluruh martabat jabatannya selain dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari organisasinya juga dapat dipecat dari jabatan notaris. Kenyataannya tidak semua notaris berlaku secara jujur adil, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Ada beberapa oknum notaris yang tidak mematuhi jabatan notaris dan kode etik notaris sehingga tidak sedikit pula notaris tersangkut perdata bahkan juga tersangkut pidana. Penelitian ini ingin melihat tujuan dalam penelitian ini perbedaan peran penyidik kepolisian Indonesia dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan notaris pasca Putusan MK No 49/ PUU-X/2012 dan peraturan Menteri dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, penelitian ini juga akan menganalisis pola penyidikan Polri dalam penanganan tindak pidana dalam perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, kemudian menganalisis model perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya pasca Putusan MK No 49/ PUU-X/2012 dan peraturan Menteri dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal*. Penelitian hukum *socio legal* mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumpositif (perundang-undangan) secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan Model perlindungan terhadap notaris pasca putusan MK Nomer 49 tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 sebagai berikut: a.MKM tetap dapat memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang berhadapan dengan hukum melalui sarana kontrak pemberian persetujuan dengan tetap berkoordinasi kepada penyidik Polri; b. Penyidik Polri apabila akan memeriksa atau memanggil noataris tidak boleh langsung tanpa pemberitahuan kepada MKN; c. Penyidik Polri, MKN , dan INI dapat membentuk forum kusus sebagai wadah dialog untuk membahas beberapa putusan penting terkait dengan notaris yang berhadapan hukum

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Notaris Penyidikan, Kepolisian Indonesia*

ABSTRACT

Legal Protection of Notary for A Notarial Deed That He Made in The Process of Investigation in Indonesian National Police

The law on the position of a notary and the code of ethics for a notary requires that a notary in carrying out his duties as a public official, in addition to being subject to the position of a notary, must be subject to the professional code and must be responsible to the community he serves, the notary professional organization (Indonesian Notary Association) and to the state. A notary who ignores all the dignity of his position in addition to being subject to moral sanctions, being reprimanded or fired from his organization can also be dismissed from his notary position. In fact, not all notaries act honestly, fairly, impartially, and protect the interests of the parties. There are several notaries who do not comply with the position of a notary and the code of ethics of a notary so that not a few notaries are involved in civil and even criminal cases. This study wants to see the purpose of this study the differences in the roles of Indonesian police investigators in handling crimes committed by notaries after the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 and Ministerial and Human Rights Regulation No. 7/2016, this study will also analyze the pattern of Police investigations in non-criminal treats in legal protection for notaries related to the deed he made, then analyze the model of legal protection for notaries who commit criminal acts related to the deed he made after the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 and Ministerial and Human Rights regulations No. 7 of 2016 This research uses a socio legal approach. Socio legal research examines the factual implementation or implementation of positive legal provisions (laws) in every particular legal event that occurs in society in order to achieve the goals that have been determined. Model of protection for notaries after the decision of the Constitutional Court Number 49 of 2012 and Permenkumham Number 7 of 2016 as the following: a. MKM can still provide legal protection to notaries who are in conflict with the law through the means of approval contracts while still coordinating with Polri investigators; b. Police investigators when going to examine or summon a notary may not directly without notification to MKN; c. Police investigators, MKN, and INI can form a special forum as a forum for dialogue to discuss several important decisions related to notaries who are in conflict with the law.

Keywords: *Legal Protection, Notary Investigation, Indonesian Police*